

## PENGETAHUAN, SIKAP, DAN PENERAPAN SANKSI MERUPAKAN FAKTOR KUNCI DALAM KEBERHASILAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK

Mulyasar Fikri Juliano<sup>1</sup>, Depi Yulyanti<sup>2</sup>, Rudiansyah<sup>3</sup>

<sup>1,3</sup> Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat, STIKes Indramayu

<sup>2</sup> Program Studi S1 Administrasi Rumah Sakit, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Bakti Tunas Husada

Alamat email : \*[depi.yulyanti@gmail.com](mailto:depi.yulyanti@gmail.com)

### ABSTRACT

The No Smoking Area (KTR) policy is a strategy implemented by the government and various organisations to create a healthy, smoke-free environment. However, the implementation of KTR in various institutions, including schools, still faces challenges, particularly low employee compliance. Based on Lawrence Green's theory, behaviour is influenced by predisposing, promoting, and reinforcing factors. This study aims to analyse the factors associated with employee compliance with the KTR policy at senior high schools/vocational schools in Indramayu District. The research method used a quantitative study with a cross-sectional approach. The research location was senior high schools/vocational schools in Indramayu District. The population in this study was all employees who had a smoking habit, totaling 75 people. The research sample used total sampling, with 75 respondents. The research instrument used a questionnaire and was analysed using the chi-square test. The results showed that knowledge ( $p = 0.0005$ ), attitude ( $p = 0.002$ ), and perception of sanctions ( $p = 0.010$ ) were significantly associated with employee compliance. Conversely, perceptions of KTR signs ( $p = 0.251$ ), rewards ( $p = 1.000$ ), and social environmental support ( $p = 0.701$ ) did not show a significant relationship. These findings emphasise the importance of increasing knowledge, fostering positive attitudes, and enforcing sanctions firmly and consistently. The recommended policy implications include comprehensive education on KTR and the consequences of violations, enforcement of sanctions without exception, creation of a healthy work culture through promotional programmes, and a monitoring and evaluation system supported by transparent communication to all school employees.

**Key words:** Knowledge, Attitude, Sanctions, KTR, Policy

### ABSTRAK

Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan strategi pemerintah dan berbagai organisasi dalam menciptakan lingkungan sehat bebas asap rokok, baik bagi perokok aktif maupun pasif. Namun, implementasi KTR di berbagai institusi, termasuk sekolah, masih menghadapi tantangan, terutama rendahnya kepatuhan pegawai. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan pegawai terhadap kebijakan KTR di SMA/SMK Kabupaten Indramayu. Metode penelitian menggunakan studi kuantitatif dengan pendekatan *cross sectional*. Tempat penelitian di SMA/SMK Sederajat di Kecamatan Indramayu, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang memiliki kebiasaan merokok sebanyak 75 orang, sampel penelitian menggunakan total sampling yaitu sebanyak 75 responden. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner, dan dianalisis melalui uji chi-square. Hasil menunjukkan bahwa pengetahuan ( $p = 0,0005$ ), sikap ( $p = 0,002$ ), dan persepsi terhadap sanksi ( $p = 0,010$ ) berhubungan signifikan dengan kepatuhan pegawai. Sebaliknya, persepsi terhadap tanda KTR ( $p = 0,251$ ), penghargaan ( $p = 1,000$ ), dan dukungan lingkungan sosial ( $p = 0,701$ ) tidak menunjukkan hubungan signifikan. Temuan ini menekankan pentingnya peningkatan pengetahuan, pembentukan sikap positif, serta penegakan sanksi secara tegas dan konsisten. Implikasi kebijakan yang disarankan meliputi edukasi menyeluruh terkait KTR dan konsekuensi pelanggaran, penegakan sanksi tanpa pengecualian, penciptaan budaya kerja sehat melalui program promotif, serta sistem monitoring dan evaluasi yang didukung komunikasi transparan kepada seluruh pegawai sekolah.

**Key words:** Pengetahuan, Sikap, Sanksi, KTR, Kebijakan

## PENDAHULUAN

Saat ini, Indonesia masih menjadi negara ketiga dengan jumlah perokok aktif terbanyak di dunia setelah China dan India. Prevalensi merokok di Indonesia sangat tinggi di berbagai kalangan masyarakat, terutama pada laki-laki, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Kecenderungan merokok terus meningkat dari tahun ke tahun baik pada laki-laki maupun perempuan, tentunya hal ini mengkhawatirkan kita semua. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menunjukkan bahwa prevalensi merokok untuk semua kelompok umur mengalami lonjakan (Kemenkes RI, 2014).

Berdasarkan Global Adult Tobacco Survey (GATS) diketahui bahwa prevalensi perokok laki-laki yang berumur 15 tahun ke atas pada tahun 2011 yakni sebesar 67,0% dan pada tahun 2021 sebesar 64,7%. Sedangkan prevalensi perempuan yang merokok pada tahun 2011 yakni sebesar 2,7% dan pada tahun 2021 sebesar 2,3% (CDC, 2021). Sementara itu, menurut Global Youth Tobacco Survey (GYTS) menyebutkan bahwa prevalensi perokok pelajar laki-laki yang berusia 13-15 tahun pada tahun 2019 yakni sebesar 35,5% sedangkan pelajar perempuan sebesar 2,9%. Angka ini menunjukkan bahwa cukup tingginya angka perokok pelajar di Indonesia (GYTS, 2020). Sementara itu untuk prevalensi perokok setiap hari di Provinsi Jawa Barat yakni sebesar 27,12% dan untuk jumlah proporsi merokok pada umur  $\geq 10$  Tahun di Kabupaten Indramayu yakni sebesar 28,87% perokok setiap hari (Kemenkes RI, 2019).

Dampak negatif penggunaan rokok pada kesehatan telah lama diketahui. Kanker paru merupakan penyebab kematian nomor satu di dunia, di samping itu juga dapat menyebabkan serangan jantung, impotensi, penyakit darah, enfisema, stroke, dan gangguan kehamilan serta janin yang sebenarnya dapat dicegah (Perda KTR Indramayu, 2016). Tingginya prevalensi perokok aktif tersebut secara tidak langsung meningkatkan jumlah perokok pasif yang terkena dampak asap rokok. Berdasarkan Global Youth Tobacco Survey (GYTS) menunjukkan bahwa 57,8% pelajar terkena paparan asap rokok di rumah dan 66,2% di ruang publik tertutup (GYTS, 2020).

Sebagai upaya untuk mengendalikan dampak dari rokok, pemerintah menetapkan Peraturan Bersama Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) serta Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa

Rokok di lingkungan sekolah. Peraturan tersebut juga didukung implementasinya oleh daerah-daerah yang telah memiliki peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok seperti Perda Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2016, yang mana salah satunya meliputi tempat proses belajar mengajar (Perda KTR Indramayu, 2016).

Seperti yang telah ditetapkan dalam Perda KTR Indramayu Nomor 8 Tahun 2016, Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan atau mempromosikan produk tembakau. Salah satu KTR yang telah ditetapkan yakni tempat proses belajar mengajar, yang dimana ini merupakan upaya pemerintah yang bertujuan untuk melindungi usia-usia produktif, anak, remaja, dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup (Perda KTR Indramayu, 2016). Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Seldjatem, 2021) implementasi kebijakan Perda KTR ini masih belum optimal sebab sosialisasi mengenai Perda KTR masih belum dilaksanakan secara konsisten dan belum secara merata dilaksanakan, serta juga belum diterapkannya pemberlakuan sanksi, sehingga masih dapat memicu perilaku merokok di kawasan yang seharusnya KTR sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perda tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan kepatuhan pegawai terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di SMA/SMK Kabupaten Indramayu dengan menggunakan teori *Green* yakni *predisposing factors, enabling factors, dan reinforcing factors*.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi kuantitatif analitik dengan pendekatan *cross sectional* dan dilaksanakan di SMA/SMK Kecamatan Indramayu dan Sindang pada bulan Juni 2023. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner ini meliputi pertanyaan variabel independen yaitu pengetahuan, sikap, persepsi plang KTR, persepsi penerapan sanksi, persepsi penerapan penghargaan atau *reward*, dan dukungan lingkungan sosial, serta variabel dependen yaitu kepatuhan pegawai terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Populasi dalam penelitian ini yakni pegawai yang berjenis kelamin laki-laki dan memiliki kebiasaan merokok pada 6 SMA/SMK di Kecamatan

Indramayu dan Sindang sebesar 75 responden, dan sampelnya yakni *total sampling* atau jumlah keseluruhan populasi. Analisis yang digunakan

adalah analisis univariate dan bivariate dengan menggunakan analisis chi-squar

## HASIL PENELITIAN

Penyajian hasil penelitian dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1 Karakteristik Responden**

Variabel	F	%
<b>Pendidikan</b>		
SMA/SMK	33	44
D3	1	1,3
S1	37	49,3
S2	4	5,3
<b>Status Kepegawaian</b>		
PNS/ASN P3K	20	26,7
Honorar	55	73,3
<b>Keberadaan Sanksi</b>		
Tidak Ada	17	22,7
Ada	58	77,3
<b>Bentuk Sanksi</b>		
Tidak Ada	17	22,7
Teguran Lisan	58	77,3
<b>Keberadaan Reward</b>		
Tidak Ada	49	65,3
Ada	26	34,7
<b>Bentuk Reward</b>		
Tidak Ada	49	65,3
Pujian	26	34,7

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa, 37 (49,3%) pegawai SMA/SMK di Kabupaten Indramayu berpendidikan S1, 55 (73,3%) pegawai SMA/SMK di Kabupaten Indramayu berstatus honorar, 58 (77,3%) pegawai SMA/SMK di Kabupaten Indramayu mengatakan ada sanksi terhadap KTR, 58 (77,3%) pegawai SMA/SMK

di Kabupaten Indramayu mengatakan bentuk sanksi terhadap KTR adalah teguran lisan, 49 (65,3%) pegawai SMA/SMK di Kabupaten Indramayu mengatakan tidak ada *reward* bagi yang patuh terhadap KTR, 49 (65,3%) pegawai SMA/SMK di Kabupaten Indramayu mengatakan tidak ada *reward* bagi yang patuh terhadap KTR.

Tabel 2 Analisis Univariat

Variabel	F	%
<b>Pengetahuan</b>		
Kurang	25	33,3
Cukup	41	54,7
Baik	9	12
<b>Sikap</b>		
Tidak Mendukung	10	13,3
Mendukung	65	86,7
<b>Persepsi Plang KTR</b>		
Tidak Mendukung	3	4
Mendukung	72	96
<b>Persepsi Sanksi</b>		
Tidak Mendukung	16	21,3
Mendukung	59	78,7
<b>Persepsi Reward</b>		
Tidak Mendukung	13	17,3
Mendukung	62	82,7
<b>Dukungan Lingkungan Sosial</b>		
Tidak Ada Dukungan	21	28
Ada Dukungan	54	72
<b>Kepatuhan</b>		
Tidak Patuh	42	56
Patuh	33	44

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa, 41 (54,7%) pegawai SMA/SMK di Kabupaten Indramayu berpengetahuan cukup tentang KTR, 65 (86,7%) pegawai SMA/SMK di Kabupaten Indramayu memiliki sikap mendukung terhadap KTR, 72 (96%) pegawai SMA/SMK di Kabupaten Indramayu memiliki persepsi mendukung terhadap plang KTR, 59 (78,7%) pegawai SMA/SMK di Kabupaten Indramayu memiliki persepsi mendukung terhadap sanksi, 62 (82,7%) pegawai SMA/SMK di Kabupaten Indramayu memiliki persepsi mendukung terhadap penghargaan atau *reward* bagi yang patuh terhadap KTR, 54 (72%) pegawai SMA/SMK di Kabupaten Indramayu ada dukungan dari lingkungan sosial, 42 (56%) pegawai SMA/SMK di Kabupaten Indramayu tidak patuh terhadap KTR.

Tabel 3 Analisis Bivariat

Variabel	Kepatuhan				N	%	P value
	Tidak Patuh	%	Patuh	%			
<b>Pengetahuan</b>							
Kurang	25	100	0	0	15	100	0,0005
Cukup	12	29,3	29	70,7	51	100	
Baik	5	55,6	4	44,4	9	100	
<b>Jumlah</b>	<b>42</b>	<b>56</b>	<b>33</b>	<b>44</b>	<b>75</b>	<b>100</b>	
<b>Sikap</b>							
Tidak Mendukung	10	100	0	0	10	100	0,002
Mendukung	32	49,2	33	50,8	65	100	
<b>Jumlah</b>	<b>42</b>	<b>56</b>	<b>33</b>	<b>44</b>	<b>75</b>	<b>100</b>	
<b>Persepsi Plang KTR</b>							
Tidak Mendukung	3	100	0	0	3	100	0,251
Mendukung	39	54,2	33	45,8	72	100	
<b>Jumlah</b>	<b>42</b>	<b>56</b>	<b>33</b>	<b>44</b>	<b>75</b>	<b>100</b>	
<b>Persepsi Sanksi</b>							
Tidak Mendukung	14	87,5	2	12,5	16	100	0,010
Mendukung	28	47,5	31	52,5	59	100	
<b>Jumlah</b>	<b>42</b>	<b>56</b>	<b>33</b>	<b>44</b>	<b>75</b>	<b>100</b>	
<b>Persepsi Reward</b>							
Tidak Mendukung	7	53,8	6	46,2	13	100	1,000
Mendukung	35	56,5	27	43,5	62	100	
<b>Jumlah</b>	<b>42</b>	<b>56</b>	<b>33</b>	<b>44</b>	<b>75</b>	<b>100</b>	
<b>Dukungan Lingkungan Sosial</b>							
Tidak Ada Dukungan	13	61,9	8	38,1	21	100	0,701
Ada Dukungan	29	53,7	25	46,3	54	100	
<b>Jumlah</b>	<b>42</b>	<b>56</b>	<b>33</b>	<b>44</b>	<b>75</b>	<b>100</b>	

Berdasarkan tabel di atas, pada variabel pengetahuan diketahui bahwa, responden berpengetahuan kurang, 100% tidak patuh terhadap KTR, responden berpengetahuan cukup, 70,7% patuh terhadap KTR dan responden berpengetahuan baik, 55,6% tidak patuh terhadap KTR. Berdasarkan analisis data dengan menggunakan uji *Chi-Square* didapatkan *p-value* 0,0005. Karena *p-value* < 0,05 maka  $H_0$  ditolak yang artinya ada hubungan antara pengetahuan dengan kepatuhan pegawai terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di SMA/SMK Kabupaten Indramayu.

Berdasarkan variabel sikap diketahui bahwa, responden yang bersikap tidak mendukung, 100% tidak patuh terhadap KTR, dan responden yang bersikap mendukung, 50,8% cenderung patuh terhadap KTR. Berdasarkan analisis data dengan menggunakan uji *Chi-Square* didapatkan *p-value* 0,002. Karena *p-value* < 0,05 maka  $H_0$  ditolak yang artinya ada hubungan antara sikap dengan kepatuhan pegawai terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di SMA/SMK Kabupaten Indramayu.

Berdasarkan variabel persepsi plang KTR diketahui bahwa, responden yang memiliki persepsi tidak mendukung, 100% tidak patuh terhadap KTR, dan responden yang memiliki persepsi mendukung, 54,2% tidak patuh terhadap KTR. Berdasarkan analisis data dengan menggunakan uji *Chi-Square* didapatkan *p-value* 0,251. Karena *p-value* > 0,05 maka  $H_0$  diterima yang artinya tidak ada hubungan antara persepsi plang KTR dengan kepatuhan pegawai terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di SMA/SMK Kabupaten Indramayu.

Berdasarkan variabel persepsi sanksi diketahui bahwa, responden yang memiliki persepsi tidak mendukung, 87,5% tidak patuh terhadap KTR, dan responden yang memiliki persepsi mendukung, 52,5% patuh terhadap KTR. Berdasarkan analisis data dengan

menggunakan uji *Chi-Square* didapatkan *p-value* 0,010. Karena *p-value* < 0,05 maka  $H_0$  ditolak yang artinya ada hubungan antara persepsi penerapan sanksi dengan kepatuhan pegawai terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di SMA/SMK Kabupaten Indramayu.

Berdasarkan variabel persepsi *reward* diketahui bahwa, responden yang memiliki persepsi tidak mendukung, 53,8% tidak patuh terhadap KTR, dan responden yang memiliki persepsi mendukung, 56,5% tidak patuh terhadap KTR. Berdasarkan analisis data dengan menggunakan uji *Chi-Square* didapatkan *p-value* 1,000. Karena *p-value* > 0,05 maka  $H_0$  diterima yang artinya tidak ada hubungan antara persepsi penerapan penghargaan atau *reward* dengan kepatuhan pegawai terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di SMA/SMK Kabupaten Indramayu.

Berdasarkan variabel dukungan lingkungan sosial diketahui bahwa, responden yang tidak ada dukungan dari lingkungan sosial, 61,9% tidak patuh terhadap KTR, dan responden yang ada dukungan dari lingkungan sosial, 53,7% tidak patuh terhadap KTR. Berdasarkan analisis data dengan menggunakan uji *Chi-Square* didapatkan *p-value* 0,701. Karena *p-value* > 0,05 maka  $H_0$  diterima yang artinya tidak ada hubungan antara dukungan lingkungan sosial dengan kepatuhan pegawai terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di SMA/SMK Kabupaten Indramayu.

## PEMBAHASAN

### Hubungan antara Pengetahuan dengan Kepatuhan Pegawai terhadap Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di SMA/SMK Kabupaten Indramayu

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ada hubungan antara pengetahuan dengan kepatuhan pegawai terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di SMA/SMK Kabupaten Indramayu. Artinya pegawai yang berpengetahuan kurang mereka tidak patuh terhadap KTR, dan pegawai yang berpengetahuan cukup cenderung patuh terhadap KTR.

Pengetahuan diperoleh melalui proses pengenalan dan ini terjadi setelah individu mengalami interaksi dengan suatu objek khusus. Interaksi ini melibatkan penggunaan indera manusia, seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan sentuhan. Mayoritas pengetahuan manusia diperoleh melalui pengamatan dan pendengaran (Notoatmodjo, 2014).

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Isti Komah, dkk (2020) diketahui bahwa ada hubungan antara pengetahuan dengan kepatuhan terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di RSUD H. Abdul Aziz Kabupaten Barito Kuala.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Syamsul Naiem dan Muh. Anwar (2019) menunjukkan bahwa ada hubungan antara pengetahuan dengan kepatuhan pengunjung terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di RSUD Kabupaten Polewali Mandar.

Penelitian yang dilakukan oleh Yulyana Kusuma Dewi, dkk (2018) menunjukkan bahwa ada hubungan antara pengetahuan tentang peraturan daerah dengan kepatuhan pegawai terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan dapat berpengaruh pada kepatuhan seseorang terhadap peraturan KTR. Seseorang yang memiliki pengetahuan yang baik cenderung mematuhi peraturan tersebut, sementara seseorang dengan pengetahuan yang kurang cenderung tidak patuh terhadap KTR, namun juga setiap orang dituntut harus tetap mematuhi peraturan tersebut. Oleh karena itu, penting bagi petugas promosi kesehatan dan tim advokasi KTR untuk secara rutin berkoordinasi dengan penanggungjawab KTR dan satgas KTR, untuk memberikan pemahaman yang lebih baik, sehingga setiap orang dapat meningkatkan pengetahuannya dan dengan demikian akan meningkatkan kepatuhan seseorang terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Dampak yang mungkin terjadi apabila tidak dilakukannya koordinasi secara rutin antara petugas promosi kesehatan dan tim advokasi KTR dengan penanggungjawab KTR dan satgas KTR yakni tingkat kepatuhan seseorang yang masih relatif rendah, tidak optimalnya edukasi dan sosialisasi tentang KTR, serta pengawasan yang kurang efektif. Oleh karena itu, penting bagi petugas promosi kesehatan, tim advokasi KTR, penanggungjawab KTR, dan satgas KTR untuk secara rutin berkoordinasi dan bekerja sama dalam upaya meningkatkan kepatuhan pegawai terhadap kebijakan KTR. Koordinasi yang baik akan meningkatkan efektivitas dan kesadaran tentang kebijakan ini, serta menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bebas dari asap rokok di lingkungan sekolah.

#### **Hubungan antara Sikap dengan Kepatuhan Pegawai terhadap Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di SMA/SMK Kabupaten Indramayu**

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ada hubungan antara sikap dengan kepatuhan

pegawai terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di SMA/SMK Kabupaten Indramayu. Artinya pegawai yang memiliki sikap yang tidak mendukung terhadap KTR mereka tidak patuh terhadap KTR, sebaliknya pegawai yang memiliki sikap mendukung terhadap KTR, mereka cenderung patuh terhadap KTR.

Sikap adalah respon atau tanggapan seseorang yang tidak terlihat secara langsung terhadap stimulus atau objek. Manifestasi sikap tidak dapat langsung diamati, namun perlu diinterpretasikan dari perilaku yang tidak tampak. Sikap bukanlah tindakan atau aktivitas, tetapi merupakan kecenderungan untuk bertindak atau berperilaku (Notoadmodjo, 2014).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Istikomah, dkk (2020) diketahui bahwa ada hubungan antara sikap dengan kepatuhan terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di RSUD H. Abdul Aziz Kabupaten Barito Kuala.

Penelitian yang dilakukan oleh Syamsul Naiem dan Muh. Anwar (2019) menunjukkan bahwa ada hubungan antara sikap dengan kepatuhan pengunjung terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di RSUD Kabupaten Polewali Mandar.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Mega Marindrawati Rochka, dkk (2019) menunjukkan bahwa ada hubungan antara sikap dengan kepatuhan pegawai mengenai aturan Kawasan Tanpa Rokok di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.

Sikap merupakan bentuk respon seseorang terhadap penerapan kawasan tanpa rokok, menunjukkan apakah mereka setuju atau tidak. Pengetahuan yang memadai tentang peraturan kawasan tanpa rokok akan membentuk sikap seseorang untuk mendukung penerapannya. Ini disebabkan oleh keyakinan mereka bahwa lingkungan bebas asap rokok manfaat positif bagi kesehatan. Penting untuk dicatat bahwa sikap positif terhadap penerapan kawasan tanpa rokok tidak selalu berkaitan dengan status merokok dan perilaku asertif untuk melarang atau menegur orang yang merokok (Progo, 2017).

Sikap patuh terhadap Kawasan Tanpa Rokok (KTR) juga dipengaruhi oleh pengawasan yang ketat dalam implementasi peraturan tersebut. Selain itu, penegakan hukum yang konsisten juga dapat mempengaruhi sikap seseorang dalam mematuhi peraturan kawasan tanpa rokok (Aherrera A, dkk, 2016). Dengan demikian, untuk membentuk sikap seseorang agar mendukung penerapannya perlu dilakukan sosialisasi tentang

KTR dan penegakkan sanksi secara konsisten oleh penanggungjawab KTR dan satgas KTR.

Dampak yang mungkin terjadi apabila kurangnya sosialisasi tentang KTR dan penegakkan sanksi yang tidak konsisten yakni tingkat kepatuhan yang relatif rendah karena tanpa pemahaman yang jelas tentang kebijakan dan ketegasan dalam menegakkan sanksi, pegawai mungkin kurang termotivasi untuk mematuhi KTR, kebijakan KTR mungkin kehilangan efektivitasnya karena penanggungjawab KTR dan satgas KTR tidak dapat sepenuhnya mencapai keadaan KTR yang diharapkan jika aturan tersebut tidak dihormati dan dilaksanakan dengan serius. Oleh karena itu, penting bagi penanggungjawab KTR dan satgas KTR untuk secara konsisten melakukan sosialisasi tentang KTR kepada seluruh warga sekolah. Selain itu, penegakkan sanksi yang tegas dan konsisten juga perlu dilakukan untuk mendorong kepatuhan pegawai terhadap kebijakan kawasan tanpa rokok. Dengan adanya langkah-langkah ini, diharapkan lingkungan sekolah dapat menjadi lebih sehat, nyaman, dan bebas dari asap rokok.

#### **Hubungan antara Persepsi Plang KTR dengan Kepatuhan Pegawai terhadap Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di SMA/SMK Kabupaten Indramayu**

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tidak ada hubungan antara persepsi plang KTR dengan kepatuhan pegawai terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di SMA/SMK Kabupaten Indramayu. Artinya pegawai yang memiliki persepsi baik yang tidak mendukung dan mendukung terhadap plang KTR mereka sama-sama cenderung tidak patuh terhadap KTR. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), plang merupakan papan nama yang memuat data atau keterangan tentang suatu hal, dalam penelitian ini plang yang dimaksud ialah plang KTR yang merupakan sebuah tanda atau papan yang memuat keterangan atau informasi tentang larangan merokok dan dipasang di KTR dengan tujuan menginformasikan bahwa di kawasan tersebut dilarang merokok untuk menciptakan lingkungan yang bebas asap rokok demi kesehatan dan kenyamanan orang yang berada di sekitar kawasan tersebut.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurlina Fari Harahap, dkk (2019) diketahui bahwa tidak ada hubungan antara tanda larangan merokok dengan penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Puskesmas Sei Agul Kota

Medan Tahun 2019.

Namun, berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulyana Kusuma Dewi, dkk (2018) menunjukkan bahwa ada hubungan antara tanda larangan merokok dengan kepatuhan pegawai terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang.

Berdasarkan pengamatan peneliti pada saat di lapangan, kesadaran para pegawai masih kurang terhadap tanda larangan merokok yang ada di sekolah, mereka tetap merokok di area sekolah tanpa mengindahkan tanda larangan merokok yang terpampang di tiap sudut ruangan, bahkan ada salah satu oknum pegawai yang justru menyembunyikan tanda larangan merokok yang berupa stiker yang semestinya dipasang di salah satu sudut ruangan. Oleh karena itu, perlu dilakukannya sosialisasi dan edukasi secara konsisten oleh petugas promosi kesehatan, penanggungjawab KTR, dan satgas KTR untuk meningkatkan pemahaman dan mendorong kepatuhan pegawai terhadap KTR.

Dampak yang mungkin terjadi apabila tidak dilakukannya sosialisasi dan edukasi secara konsisten yakni tanpa sosialisasi dan edukasi yang konsisten, pegawai mungkin kurang memiliki pemahaman tentang bahaya merokok dan pentingnya kebijakan KTR, kurangnya informasi yang jelas tentang KTR dapat menyebabkan kebingungan di kalangan pegawai, hal ini dapat berujung pada potensi konflik antara pegawai yang mengerti aturan dengan baik dan pegawai yang kurang paham tentang KTR. Oleh karena itu, penting bagi petugas promosi kesehatan, penanggungjawab KTR, dan satgas KTR untuk melakukan sosialisasi dan edukasi tentang KTR secara konsisten. Dengan menyediakan informasi yang jelas dan terus-menerus mengingatkan pegawai tentang pentingnya KTR, diharapkan pemahaman dan kesadaran akan KTR dapat meningkat, serta dukungan dan kepatuhan pegawai terhadap KTR akan meningkat, dan tujuan menciptakan lingkungan sekolah yang sehat dan bebas dari asap rokok dapat tercapai secara lebih efektif.

#### **Hubungan antara Persepsi Penerapan Sanksi dengan Kepatuhan Pegawai terhadap Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di SMA/SMK Kabupaten Indramayu**

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ada hubungan antara persepsi penerapan sanksi dengan kepatuhan pegawai terhadap kebijakan

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di SMA/SMK Kabupaten Indramayu. Artinya pegawai yang memiliki persepsi tidak mendukung terhadap sanksi mereka cenderung tidak patuh terhadap KTR, sebaliknya pegawai yang memiliki persepsi mendukung mereka cenderung patuh terhadap KTR.

Sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan tanggungan yang berupa tindakan atau hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati peraturan atau undang-undang. Menurut (Syadad, 2018) sanksi merupakan sebagai akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok atau perseorangan, sanksi juga terdapat bermacam jenis seperti sanksi sosial, sanksi administrasi, sanksi adat, bahkan sanksi pidana.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yulyana Kusuma Dewi, dkk (2018) diketahui bahwa ada hubungan antara penerapan sanksi dengan kepatuhan pegawai terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Farida Lumbantobing, dkk (2020) menunjukkan bahwa ada hubungan antara penerapan sanksi dengan perilaku merokok pegawai pada Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di UPT Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan, penerapan sanksi terhadap pegawai memiliki pengaruh terhadap perilaku merokok mereka. Peneliti di lapangan juga menemukan hingga saat ini penerapan sanksi bagi pegawai yang merokok di Kawasan Tanpa Rokok (KTR) hanya sebatas sanksi teguran secara lisan tanpa adanya sanksi yang tegas. Namun ketika sanksi yang tegas diterapkan, pegawai akan cenderung untuk mematuhi peraturan tersebut. Adanya dukungan dari pimpinan dalam memberlakukan sanksi yang tegas dan konsisten juga akan mempengaruhi perilaku merokok pegawai di Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Dampak yang mungkin terjadi apabila tidak adanya dukungan dari pimpinan yakni tanpa dukungan dari pimpinan, pegawai mungkin merasa bahwa aturan KTR tidak dianggap serius dan aturan tersebut dapat diabaikan. Akibatnya, tingkat kepatuhan pegawai terhadap KTR dapat menurun, sikap dan perilaku pegawai dapat berpengaruh pada perilaku siswa, apabila siswa melihat pegawai tidak mematuhi aturan KTR dengan serius, mereka juga mungkin cenderung untuk mengabaikan aturan KTR, kurangnya contoh positif dan tanpa dukungan dari pimpinan untuk menegakkan

sanksi yang tegas dan konsisten dapat mengurangi efektivitas kebijakan KTR.

### **Hubungan antara Persepsi Penerapan Penghargaan atau Reward dengan Kepatuhan Pegawai terhadap Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di SMA/SMK Kabupaten Indramayu**

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tidak ada hubungan antara persepsi penerapan penghargaan atau reward dengan kepatuhan pegawai terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di SMA/SMK Kabupaten Indramayu. Artinya pegawai yang memiliki persepsi baik yang tidak mendukung dan mendukung terhadap penghargaan atau reward mereka sama-sama cenderung tidak patuh terhadap KTR.

Menurut Arikunto (1993) dalam (Riadi, 2020) penghargaan atau reward adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang sebagai pengakuan atas prestasi yang telah dicapai sesuai dengan yang diinginkan. Berdasarkan di lapangan peneliti menemukan bahwa sebagian besar pegawai menganggap bahwa penghargaan atau reward tidak terlalu berpengaruh terhadap perilaku mereka untuk mematuhi peraturan KTR, dengan kata lain ada atau tidaknya reward mereka akan tetap merokok di KTR. Hal ini dikarenakan belum diterapkannya pemberian reward kepada pegawai yang patuh dan apabila ada pun hanya sebatas pujian sehingga tidak terlalu memotivasi pegawai untuk mematuhi peraturan KTR. Dengan demikian, untuk memotivasi pegawai agar patuh terhadap KTR perlu diterapkannya pemberian reward yang bukan hanya sebatas pujian, melainkan dapat berupa pemberian semacam hadiah dan dilakukan secara konsisten untuk menjaga motivasi agar tetap patuh terhadap KTR.

Dampak yang mungkin terjadi apabila tidak adanya pemberian reward yang bermakna dan konsisten yakni tanpa pemberian reward yang konsisten, motivasi pegawai untuk tetap patuh terhadap KTR mungkin menurun. Pemberian reward berupa hadiah dapat menjadi pendorong positif bagi pegawai untuk mematuhi kebijakan, dan juga dapat berfungsi sebagai bentuk pengakuan atas kepatuhan pegawai terhadap KTR. Tanpa reward, pegawai mungkin merasa usahanya tidak diakui atau dihargai, sehingga motivasi mereka untuk patuh terhadap KTR dapat berkurang.

### **Hubungan antara Dukungan Lingkungan Sosial dengan Kepatuhan Pegawai terhadap Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di SMA/SMK Kabupaten Indramayu**

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tidak ada hubungan antara dukungan lingkungan sosial dengan kepatuhan pegawai terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di SMA/SMK Kabupaten Indramayu. Artinya pegawai yang baik ada dukungan dari lingkungan sosial maupun yang tidak ada dukungan dari lingkungan sosial dalam hal ini rekan kerja untuk patuh terhadap KTR, mereka sama-sama cenderung tidak patuh terhadap KTR. Lingkungan sosial merupakan lingkungan dimana aktivitas sehari-hari dilaksanakan.

Keadaan lingkungan sosial yang berbeda di setiap tempat akan mempengaruhi perilaku dan kedisiplinan seseorang, karena perilaku dan kedisiplinan seseorang merupakan cerminan dari lingkungan tempat tinggalnya (Handayani, 2018). Menurut Sadulloh dalam (Abdurrahman & Oktapiani, 2019) lingkungan sosial merupakan bentuk hubungan sikap atau tingkah laku antar manusia, dan hubungannya antar manusia dengan manusia disekitarnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rizka Fitria Fajrin (2019) diketahui bahwa tidak ada hubungan yang bermakna antara dukungan rekan kerja dengan kepatuhan terhadap KTR.

Penelitian ini tidak sebanding dengan penelitian yang dilakukan oleh Mega Marindrawati Rochka (2019) menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara dukungan sosial dengan kepatuhan pegawai mengenai aturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.

Peneliti di lapangan menemukan bahwa sebagian besar pegawai tetap merokok di KTR baik yang tidak ada dukungan maupun ada dukungan dari lingkungan sosial dalam hal ini rekan kerja untuk patuh terhadap KTR. Hal ini disebabkan oleh salah satunya ialah pegawai yang tidak memiliki kewenangan sebagai pengawas merasa enggan atau bahkan merasa tidak enak untuk menegur atau mengingatkan rekan kerja yang merokok sembarangan. Dalam beberapa kasus, teguran dari pegawai sudah dilakukan namun diabaikan oleh pegawai lain yang terbiasa merokok di KTR. Oleh karena itu pentingnya kesadaran dalam diri masing-masing dan menumbuhkan rasa saling menghargai kepada orang yang tidak merokok karena mereka juga memiliki hak akan udara yang bersih dan sehat.

Dampak yang mungkin terjadi apabila kurangnya kesadaran dan rasa saling menghargai yakni dapat menyebabkan konflik antar individu yang berbeda dalam hal kepatuhan terhadap KTR. Hal ini dapat mengganggu keharmonisan di lingkungan sekolah, kesadaran dan rasa saling menghargai juga sebagai dasar untuk terbentuknya budaya kepatuhan di lingkungan sekolah. Tanpa ini, budaya kepatuhan terhadap KTR mungkin tidak terbentuk atau kurang kuat di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, penting untuk membangun kesadaran dan rasa saling menghargai di antara seluruh warga sekolah terkait dengan KTR. Edukasi dan sosialisasi tentang bahaya merokok dan manfaat KTR perlu dilakukan secara konsisten untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap KTR. Selain itu, diperlukan komitmen dari setiap individu untuk mematuhi kebijakan KTR dan menghormati hak orang lain akan udara yang bersih dan sehat. Dengan demikian, lingkungan sekolah dapat menjadi lebih sehat, harmonis, dan mendukung bagi kesehatan dan kenyamanan semua warga sekolah.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, ada hubungan antara pengetahuan, sikap, dan persepsi penerapan sanksi dengan kepatuhan pegawai terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di SMA/SMK Kabupaten Indramayu.

### **Saran**

1. **Pendalaman Aspek Kualitatif**  
Disarankan agar dilakukan penelitian kualitatif untuk menggali lebih dalam persepsi, hambatan, dan motivasi pegawai terhadap kepatuhan KTR. Metode seperti wawancara mendalam atau FGD (focus group discussion) dapat memberikan pemahaman kontekstual yang tidak dapat ditangkap melalui pendekatan kuantitatif semata.
2. **Evaluasi Implementasi Kebijakan dan Dukungan Struktural**
3. Penelitian berikutnya dapat menilai peran kepemimpinan sekolah, struktur pengawasan, dan ketersediaan sarana/prasarana KTR dalam mendorong kepatuhan. Faktor institusional seperti regulasi internal,

SOP KTR, dan komitmen manajemen perlu dievaluasi lebih lanjut.

#### 4. Uji Efektivitas Intervensi Edukatif dan Represif

Disarankan untuk menguji intervensi berbasis edukasi (peningkatan literasi KTR) dibandingkan dengan pendekatan represif (penerapan sanksi tegas) guna mengetahui strategi yang paling efektif dalam meningkatkan kepatuhan pegawai terhadap kebijakan KTR.

#### 5. Integrasi dengan Aspek Psikososial

Penelitian lanjutan juga sebaiknya mempertimbangkan faktor psikososial seperti norma sosial, tekanan teman sebaya, dan nilai-nilai budaya lokal yang mungkin berkontribusi terhadap perilaku merokok dan kepatuhan terhadap KTR.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, S. W., & Oktapiani, S. (2019). Pengaruh Literasi Keuangan dan Lingkungan Sosial Terhadap Perilaku Keuangan Mahasiswa Universitas Teknologi Sumbawa. 05(02), 50–55.
- Aherrera A, Çarkoğlu A, Hayran M, Ergör G, Eirüder T, Kaplan B, Susan J, Zheng L, Cohen JE, Navas-Acien A. Factors that influence attitude and enforcement of the smoke-free law in Turkey: a survey of hospitality venue owners and employees. *Tob Control*. 2016 Sep;26(5):540-547. doi: 10.1136/tobaccocontrol-2016-053088. Epub 2016 Sep 19. PMID: 27645254.
- Badan Pusat Statistik. (2021). Persentase Merokok Pada Penduduk > 15 Tahun Menurut Provinsi (Persen), 2019-2021. <https://www.bps.go.id/indicator/30/1435/1/persentase-merokok-pada-penduduk-umur-15-tahun-menurut-provinsi.html>
- CDC. (2021). GATS (Global Adult Tobacco Survey) Comparison Fact Sheet Indonesia 2011 & 2021. Global Adult Tobacco Survey, 1–2. <https://cdn.who.int/media/docs/default-source/ncds/ncd-surveillance/data-reporting/indonesia/indonesia-national-2021---2011-comparison-factsheet.pdf>
- GYTS. (2020). Lembar Informasi Indonesia 2019 (Global Youth Tobacco Survey). World Health Organization, 1–2. <https://www.who.int/indonesia/news/events/world-no-tobacco-day-2020>
- Handayani, I. R. (2018). Peran Lingkungan Sosial Terhadap Perilaku dan Kedisiplinan Anak Usia Sekolah Dasar.
- Harahap, N. F., Sinaga, J. P., & Sembiring, B. (2019). Analisis Faktor yang Berhubungan dengan Penerapan Kawasan Tanpa Asap di Puskesmas Sei Agul Kota Medan. 2(1), 40–49. <http://ejournal.delihusada.ac.id/index.php/JK2M/article/view/398/298>
- Kemenkes RI. (2014). Perilaku Merokok Masyarakat Indonesia (pp. 1–11)
- Kemenkes RI. (2019). Laporan Provinsi Jawa Barat, Riskesdas 2018. In Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- Komah, I., Asrinawaty, & Aquarista, M. F. (2020). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di RSUD H. Abdul Aziz Kabupaten Barito Kuala Sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2015 Tahun 2020.
- Lumbantobing, F., Marsaulina, I., & Ariani, P. (2020). Analisis Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Merokok Pegawai Pada Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Di Upt Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020. [http://ejournal.delihusada.ac.id/index.php/JK\\_2M/article/view/417/301](http://ejournal.delihusada.ac.id/index.php/JK_2M/article/view/417/301)
- Notoatmodjo, S. (2014). Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan. PT. Rineka Cipta.
- Perda. (2016). Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok Kabupaten Indramayu.
- Progo, K. (2017). Kepatuhan dan Ketegasan Pegawai Negeri pada Peraturan Daerah Bebas Rokok : Studi Komparatif di Kabupaten Sleman dan Kulon Progo. *Berita Kedokteran Masyarakat*, 33,609-614
- Rahajeng, E. (2015). Pengaruh Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Terhadap Penurunan Proporsi Perokok di Provinsi DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bali. *Peneliti Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat*, 151, 10–17.
- Riadi, M. (2020). Reward atau Penghargaan (Pengertian, Tujuan, Jenis dan Syarat). <https://www.kajianpustaka.com/2020/04/reward-atau-penghargaan-pengertian-tujuan-dan-syarat.html>
- Rocha, M. M., Rahmadani, S., & Anwar, A. A. (2019). Analisis determinan kepatuhan pegawai terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Dinas pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. *VISI KES : Jurnal Kesehatan Masyarakat*, September 2019, 190–202.
- Seldjatem, O. M. (2021). Analisis Implementasi

- Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Di Kabupaten Indramayu.
- Syadad, H. (2018). Sanksi. Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI Prov. Kaltim. <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/balikhpapan/id/data-publikasi/berita-terbaru/2830-sanksi.html>
- Syamsul Naiem, Muh. Anwar. (2019). Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Pengunjung Terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Umum Daerah. *Jurnal Kesmas*.
- WHO. (2019). Prevalence | Tobacco Atlas. Tobacco Atlas. <https://tobaccoatlas.org/challenges/prevalence>
- Yoshef Arieka Marchel, Ratih Indraswari, N. H. (2019). Implementasi Kawasan Tanpa Rokok Sebagai Pencegahan Merokok Pada Remaja Awal. *Jurnal PROMKES*, 7(2), 144. <https://doi.org/10.20473/jpk.v7.i2.2019.144-155>
- Yulyana K., Fauziah N., & Andries, L. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pegawai terhadap Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang. *Sriwijaya Journal of Medicine*.